Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound

Nata Sundari, Fasya Zahra Luthfiyah, Windi Rahmawati. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, natasundari4@gmail.com

ABSTRACT: Law as a tool of social engineering can be interpreted as a way to change the behavior of a society, in accordance with predetermined goals. These factors come from legislators, law enforcers, justice seekers, or others. According to Roscoe Pound, the function of law as a tool for social engineering (Law as a tool of social engineering) aims to create harmony and harmony in society so that it suits the interests and needs of society. This research aims to describe the role of law as an engineering tool by Roscoe Pound and this thinking according to Prof. Mochtar Kusumaatmadja. In this research, the method used is a normative method, a philosophical approach. Techniques for collecting and using literature studies which use legal materials such as legal theory, legal opinions, which include legal books and legal journals. As for other data from websites on the internet. Then there are also non-legal sources such as the Big Indonesian Dictionary to support the writing of this research. Roscoe Pound stated that social engineering is necessary to strengthen the civilization of human society because it controls antisocial behavior which is contrary to the rules of social order. Law, as a mechanism of social control, is the primary function of the state and operates through the systematic and regular application of force by agents appointed to carry out that function. However, Pound added that the law alone was not enough, he needed support from family, educational, moral and religious institutions.

KEYWORDS: Law as change, social engineering, Roscoe Pound, Social Jurisprudence

ABSTRAK: Law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengubah perilaku suatu masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, pencari keadilan, atau lainnya. Fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (Law as a tool of sosial engineering) menurut Roscoe Pound memiliki bertujuan untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat agar

sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan hukum sebagai alat rekayasa oleh Roscoe Pound dan pemikiran tersebut menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode normatif, pendekatan Filsafat atau Philosophical Approach Teknik pengumpulan dan menggunakan studi kepustakaan yang mana menggunakan bahan hukum seperti teori hukum, pendapat hukum yang mana terdapat buku hukum, jurnal hukum. Adapun data lain dari website yang ada di internet. Kemudian juga terdapat sumber non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menunjang penulisan penelitian ini. Roscoe Pound menyatakan bahwa rekayasa sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan.

KATA KUNCI: Hukum sebagai perubahan, social engineering, Roscoe Pound, Social Jurisprudence.

I. PENDAHULUAN

Hukum selalu berkaitan dengan Masyarakat yang mana terdapat adagium hukum yang menyebutkan “Ubi societas, ibi ius” yang artinya “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Hukum ini memiliki peran untuk menjaga ketertiban, keadilan dan keamanan untuk masyarakat. Hukum juga berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia seperti kesusilaan, perkawinan, lingkungan, kesehatan dll. Hukum bergerak lebih lambat dibanding dengan masyarakat yang selalau bergerak dinamis. Dimana hal ini hukum dibuat secara tertulis seperti perundang-undangan yang mana pada proses pembuatan terdapat syarat formal yang perlu dilalui san rumit. Hukum seharusnya dapat disesuaikan dengan perubahan masyarakat karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang kuat.

Hubungan perubahan masyarakat dengan hukum adalah hubungan timbal balik yang berarti hukum berpengaruh terhadap perubahan masyarakat. Perubahan pada hukum dapat mempengaruhi masyarakat yang mana hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat perubahan pada masyarakat atau sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (social engineering) (Lathif, 2017)

Fungsi hukum sebagai alat untuk rekayasa masyarakat (Law as a tool of sosial engineering) menurut Roscoe Pound memiliki bertujuan untuk menciptakan keserasian dan harmoni dalam masyarakat agar sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan pada masyarakat tersebut. Roscoe Pound merupakan salah seorang pemikir hukum di dunia yang pemikirannya dapat diperhitungkan dan diperbincangkan. Roscoe Pound merupakan tokoh utama pada aliran sociological jurisprudence.

Roscoe Pound lahir Nathan Roscoe Pound pada tanggal 27 Oktober 1870 di Lincoln, Nebraska, Amerika Serikat. Ia merupakan putra dari pasangan Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Setelah mempelajari botani di Universitas Nebraska dan hukum di Harvard pada tahun 1889-1890, Roscoe Pound melanjutkan studi di Nebraska, berpraktik hukum dan mengajar di universitas negeri dari tahun 1890

sampai 1903. Roscoe Pound kemudian melanjutkan studinya di Harvard dan menjadi profesor hukum dari tahun 1910 hingga 1937. Roscoe Pound juga menjabat sebagai dekan sekolah hukum dari tahun 1916 hingga 1936. Masa kepemimpinan Roscoe Pound ini sebagai masa keemasan Harvard Law School. Karena, Roscoe Pound merancang sistem pendidikan hukum Harvard yang bertujuan untuk implementasi pemikiran hukumnya dalam aliran *sociological jurisprudence*. Roscoe Pound merupakan salah satu pemikir hukum terkemuka dunia, yang gagasannya dapat diperdebatkan. Roscoe Pound adalah tokoh penting dalam *sociological jurisprudence* (Sisma, 2023)

Aliran *sociological jurisprudence* salah satu aliran filsafat hukum yang memelajari mengenai timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan dapat sebaliknya. Berbeda sosiologi hukum yang merupakan cabang ilmu sosiologi yang membahas hukum dijadikan gejala sosial. Pada aliran *sociological jurisprudence*, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga pada aliran ini memisahkan antara hukum positif dan hukum yang hidup (Aprita & Adhitya, 2020)

Sehingga pemikiran Roscoe Pound lebih menonjol mengenai hukum yang sesuai dengan masyarakat karena dalam aliran ini melihat bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Kemudian tujuan aliran ini untuk menemukan hukum yang ideal bagi masyarakat. Sehingga tercapainya cita-cita hukum dalam aliran ini untuk mewujudkan keselarasan dan harmonisasi dalam masyarakat.

Pemikiran dari Roscoe Pound ini dapat lahir karena respon Ketika Amerika menghadapi perubahan masyarakat yang dasyat. Namun para ahli kala itu masih tetap berpikir secara statis, Dimana hukum dianggap tidak pernah bergerak. Ia memiliki anggapan jika menempatkan hukum sebagai alat perubahan sosial. Maka ahli hukum maupun hakim perlu meniggalkan sikap yang statis tersebut. Sehingga dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan yang terdapat pada masyarakat. Selain itu dari pemikiran dari ini juga terpengaruh dari aliran realisme Amerika karena ia hidup 1870-1964 dan merupakan warga negara Amerika

Serikat. Dimana pada awal tahun 90-an muncul aliran realisme hukum (Latipulhayat, 2014)

Sehingga dari pemikiran Roscoe Pound ini dirapkan dapat menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Pada pemikirannya ini yang menjadi poros utamanya adalah penegak hukum dan ahli hukum itu sendiri untuk membawa perubahan terhadap masyarakat. Pemikiran dari Roscoe Pound ini oleh Prof Mochtar Kusumaatmadja diperkenal di Indonesia.

Pada penelitian ini penulis tertarik Untuk membahas hal ini sehingga mengambil judul “Peran Hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound” hal ini bertujuan untuk deskripsikan peran hukum sebagai alat rekayasa oleh Roscoe Pound dan pemikiran tersebut menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja di Indonesia.

II. METODE

Metode yang digunakan adalah metode normatif ialah dengan mempelajari dokumen yang menjadi sumber untuk bahan hukum dapat berupa perundang-undangan, ketetapan maupun Keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum dan pendapat dari sarjana hukum. Yang mana akan dijabarkan secara kualitatif yaitu dengan deskriptif analitis. Kemudian pendekatan Filsafat atau Philosophical Approach yang mana dilakukan dengan mengupas persoalan hukum secara menyeluruh, serta mendasar dan spekulatif yang hal ini sesuai dengan sifat dari filsafat. Kemudian Teknik pengumpulan dan menggunakan studi kepustakaan yang mana menggunakan bahan hukum seperti teori hukum, pendapat hukum yang mana terdapat buku hukum, jurnal hukum. Adapun data lain dari website yang ada di internet. Kemudian juga terdapat sumber non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menunjang penulisan penelitian ini (Muhaimin, 2020).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hukum lambat laun menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai sarana penting untuk mencapai ketertiban sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk menjaga peradaban. Fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan “aspek internal sifat manusia”, yang sangat diperlukan untuk mengendalikan aspek eksternal dan lingkungan fisik. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sesuai dengan salah satu fungsi hukum: sebagai instrumen perubahan sosial atau alat pembentuk masyarakat (social engineering).

Law as a tool of sosial engineering adalah sebuah teori disampaikan oleh Roscoe Pound yang artinya hukum menjadi alat pembaharuan atau merekayasa pada Masyarakat. dalam hal ini hukum diharapkan turut andil dalam perubahan nilai sosial pada Masyarakat. Sehingga ia menyatakan hukum bukan hanya untuk meneruskan kekuasaan, tapi dapat memiliki fungsi sebagai alat rekayasa sosial(Orlando, 2023).

Hukum diartikan sebagai sesuatu yang sangat terspesialisasi bentuk kontrol sosial dalam masyarakat yang terorganisir secara politik dicapai melalui penerapan yang sistematis dan teratur melalui kekuatan masyarakat. Hukum didefinisikan sebagai tugas rekayasa sosial yang dirancang untuk menghilangkan perbedaan pendapat dan untuk kepuasan kepentingan manusia. Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum tidak dapat dinilai dengan mengacu pada hukum itu sendiri, seperti yang dinilai oleh sekolah analitis, atau sehubungan dengan gambaran hukum yang ideal, seperti yang dilakukan kaum formalis, tetapi harus dinilai secara fungsional sehubungan dengan tujuannya. (McManaman, 1958)

Pound juga mengakui bahwa peran lain dari Hukum tersebut adalah melakukan rekayasa sosial. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau suatu hal lain. Ini adalah “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan

sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan” Ini adalah alat yang memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini merupakan inti dari teori ini. Tertarik. Dikatakannya bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan tersebut dan menetapkan batasan-batasan bagi pengakuan kepentingan-kepentingan tersebut, dan bahwa aturan hukum yang dikembangkan dan ditegakkan melalui proses peradilan adalah hal yang positif. Dikatakan bahwa sistem tersebut akan efektif dan dilaksanakan. Melalui prosedur-prosedur yang mengikat, dan juga berupaya untuk menghormati kepentingan-kepentingan yang berbeda sesuai dengan batasan-batasan yang diakui dan ditetapkan.(Lathif, 2017)

Hukum bersifat statis dikarenakan hukum dibuat secara tertulis membuat sebuah hukum sulit beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Hukum yang bersifat statis ini membuat Hukum menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, yang mana hal ini pengaruh dari positivisme hukum yang mana fokusnya pada pembuatan hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa dengan menekankan pada kepastian hukum sehingga menjadikan hukum bersifat kaku dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga Roscoe Pound mengharapkan hukum menjadialat rekayasa sosial.

Law as a tool of social engineering dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mengubah perilaku suatu masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, pencari keadilan, atau lainnya . Hukum tidak hanya berfungsi untuk menegaskan pola-pola kebiasaan dan perilaku yang ada dalam masyarakat, tetapi juga mengarahkannya pada tujuan yang diinginkan, dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak diinginkan, dan menciptakan pola perilaku baru dan sebagainya. Inilah disebut dengan suatu pandangan modern yang mengarah pada pandangan hukum sebagai sarana, khususnya hukum sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool social engineering) (Yahya & Alimuddin, 2022).

Untuk memenuhi fungsinya Hukum sebagai alat rekayasa sosial, Roscoe Pound kemudian mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh undang-undang berikut :

1. Kepentingan publik (public interest), Itu kebutuhan public oleh individu berasal dari politik kehidupan, dimana setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain dan memanfaatkan barang yang dibuka untuk umum minat.
2. Kepentingan masyarakat (social interest), Tuntutan dalam kehidupan sosial melibatkan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat berfungsi dan tetap terjaga dengan baik.
3. Kepentingan pribadi (individual interest), Kepentingan individu klaim atau tuntutan datang dari perspektif individu manusia kehidupan terdiri dari pribadi kepentingan, domestik atau rumah tangga hubungan minat, kepentingan substantif. (Pound, 1943)

Menurut Pound, kemajuan hukum terjadi bila ada keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Roscoe Pound membagi kepentingan yang dilindungi hukum menjadi tiga kategori utama. Pertama, kepentingan umum. Termasuk kepentingan negara sebagai badan hukum dalam rangka kewajiban melindungi hakekat negara dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Kedua, kepentingan pribadi dalam Pound dibedakan lagi menjadi tiga kepentingan: kepentingan pribadi (badan, kehendak bebas, kehormatan, privasi, keyakinan dan pendapat), kepentingan hubungan keluarga, dan kepentingan harta benda yang akan dilakukan. Ketiga, manfaat sosial meliputi keamanan umum, keamanan institusi sosial, moralitas umum, keamanan sumber daya masyarakat, kemajuan sosial, dan kehidupan individu. (Rato dkk., 2023)

Faktor penentu pembentuk hukum yaitu seperti penegak hukum, para pencari keadilan, golongan-golongan lain dalam masyarakat. Ini

perlu diteliti demi keefektifan dalam hukum sebagai alat rekayasa sosial. Karena dapat terjadi ketidaksesuaian dengan Masyarakat yang mengakibatkan penegakan hukum pada penerapannya menjadi tidak efektif. Sehingga hal tersebut dapat menjadi masalah hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kemudian terdapat kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi seperti kepentingan public, kepentingan Masyarakat, kepentingan badan hukum, dan keluarga.

Pada konsep Social Engineering, hakim maupun ahli hukum perlu meninggalkan sikap yang kaku (rigid) yaitu terhadap pemahaman mengenai hukum dan perlu menunjang terhadap perubahan-perubahan dalam Masyarakat sehingga terciptanya hukum yang dapat menjembatani terwujudnya aspirasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehingga mengurangi terjadinya friksi sosial. Pada konteks ini Pound mendefinisikan (interest) kepentingan sebagai tuntutan, kebutuhan dan kehendak, serta harapan dari Masyarakat. sehingga dengan konsep Social Engineering ini hakim maupun ahli hukum dapat dapat menciptakan sebuah keseimbangan terhadap konflik maupun benturan yang terdapat dimasyarakat untuk keseimbangan yang harmoni. (Roscoe, 1940)

Hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki fungsi dan untuk menyeimbangkan konflik dimasyarakat yang mana dalam hal ini perlu dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum yang mana baik ahli hukum maupun hakim dalam menafsirkan hukum tidaklah kaku seperti pada paham positivisme lebih kaku dalam menafsirkan hukum. hal ini bertujuan untuk mewujudkan hukum yang seimbang dan harmoni sesuai dengan mazhab yang dianut oleh Roscoe Pound yakni sociological jurisprudence.

Selain itu Roscoe Pound juga menyampaikan hukum yang sebenarnya ialah hukum yang dijalankan. Jadi hukum tidak hanya undang-undang, tetapi hukum juga termasuk apa yang dilaksanakan oleh penegak hukum atau siapapun yang menjalankan fungsi hukum dalam pelaksanaan hukum atau dapat disebut hukum tidak hanya law in the book tetapi law in action. Sehingga Roscoe Pound mengatakan

bahwa hukum adalah suatu alat rekayasa sosial (Law as a tool of social engineering and social control) dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan dan harmoni dan keserasian yang dapat optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam masyarakat. Sehingga Roscoe Pound merumuskan terdapat empat fungsi pada hukum, yaitu :

1. Ketertiban pada masyarakat dan pemeliharaan hukum
2. Menjaga status quo pada masyarakat;
3. Menjadi kebebasan individu
4. Pemenuhan kesuain hukum pada Masyarakat.(Martinelli dkk., 2023)

Rescou Pound berpendapat bahwa rekayasa sosial ini sangat diperlukan untuk memperkuat peradaban masyarakat manusianya karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan aturan tatanan sosial.hukum itu sebagai sebuah mekanisme kontrol sosial yang berfungsi untuk keutamaan negara,dan hukm bekerja melalui penggunaan kekuatan yang sistematis dan teratur oleh agen - agen yang ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut . namun pound itu menambahkan undang - undang saja tidak cukup dan ia pun membutuhkan dukungan dari lembaga keluarga,pendidikan,moral,dan agama.hukum merupakan suatu sistem doktrinal yang mengandung unsur ideal dan empiris yang selalu memadukan hukum alam dan teori positivisme (Safira, 2017).

Jadi tidak hanya dari aturan tertulis itu sendiri ataupun penegak hukum yang mempengaruhi hukum sebagai rekayasa sosial juga dapat dipengaruhi oleh Masyarakat itu sendiri yaitu penerapannya pada keluarga, moral, agama dan Pendidikan. Yang mana itu semua adalah nilai atau institusi yang hidup dalam Masyarakat. sehingga dapat dikatakan hubungan masyarakat dan hukum terdapat hubungan timbal balik.

A. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial Menurut Mochtar Kusumaatmaja

Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan mengenai teori Law as a tool of sosial engineering oleh Roscoe Pound di Indonesia pada tahun 1970. Kemudian ia modifikasi menjadi hukum pembangunan dan disebut sebagai konsep pembinaan hukum yang diadaptasi dari teori Roscoe Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika Serikat. hukum Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.

Dalam tulisan berjudul “Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional”, Mochtar Kusuma Atmaja menyatakan:

“Pembangunan disini tentunya yang dimaksudkan adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun bercirikan perubahan dan peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa, perubahan itu terjadi secara teratur. Karena, baik perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar daripada masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi alat yang tak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan itu peranan hukum adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat”. Firman Muntaqo, SH., M.Hum.

Mochtar Kusumaatmadja mengubah kata tool yang artinya alat menjadi instrument yang artinya adalah sarana. Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

Menurut Mochtar pengertian makna hukum sebagai instrument memiliki arti yang lebih luas dibandingkan makna hukum sebagai alat karena:

1. Di Indonesia, peran peraturan perundang-undangan dalam proses reformasi hukum itu lebih terlihat dibandingkan dengan, misalnya, di Amerika Serikat, di mana

yurisprudensi (khususnya putusan Mahkamah Agung) lebih penting.

2. 2. Konsep hukum sebagai “alat” tidak bisa membawa hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legalisme” yang berlaku pada era Hindia Belanda, dan merupakan sikap di Indonesia yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak permintaan tersebut dari konsep yang seperti itu.
3. Jika “hukum” di sini juga mencakup hukum internasional, maka konsep hukum itu sebagai instrumen reformasi sosial telah diperkenalkan jauh sebelum konsep tersebut secara resmi diadopsi sebagai landasan kebijakan hukum nasional. (Kamil, 2022)

Hukum sebagai sara perubahan tentunya harus menyesuaikan dengan Masyarakat Indonesia multicultural. Selain itu hukum di Indonesia bersifat positivisme yang hukum mengikuti peraturan yang tertulis, yang dalam positivisme membuat aturan tertulis menjadi alat untuk penyampaian hukum. Menjadikan hukum sebagai alat menurut Mochtar Kusumaatmadja tidak ada bedanya dengan hukum yang telah ada di Indonesia yang diturunkan oleh Belanda. Sehingga pilihan kata sarana lebih tepat untuk Pembangunan hukum karena sifatnya lebih luas.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak lepas dari pemahaman bahwa hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hukum telah merambah ke ranah politik, menjadi sarana pelaksanaan keputusan politik dan dampaknya bisa positif atau negatif, seperti:

1. Dampak positif dari hukum sebagai rekayasa sosial memberikan perubahan pada pola-pola tertentu pada suatu Masyarakat, sehingga dapat mempertahankan kebiasaan menjadi hal yang dapat ditaati dan diyakini, maupun kedalam bentuk perubahan lain. dalam kata lain menghilangkan kebiasaan yang dianggap tidak lagi sesuai

dengan kondisi Masyarakat, atau membentuk kebiasaan yang baru dan lebih baik dari sebelumnya.

2. Tidak hanya terdapat dampak positif tapi dalam hukum sebagai rekayasa sosial juga memberikan dampak yang negatif yaitu seperti: Perbedaan pendapat menimbulkan kesenjangan sosial, masyarakat melanggar hukum, dan sebagainya. Selain itu juga memiliki dampak negatif pada materiil yaitu itulah yang diinginkan masyarakat. Ini tidak mudah. Kita harus bertanya kepada masyarakat yang berbeda dan kompleks mengenai apa yang mereka inginkan dari pemerintah. (Harahap dkk, 2021)

Tentunya pada suatu perubahan atau pembaharuan yang mana hal ini merupakan tujuan dari Law as a tool of sosial engineering, ada perbedaan pendapat atau ketidaksetujuan terhadap suatu perubahan sehingga ini dapat menimbulkan konflik dan membuat sehingga dapat membuat suatu keteraturan tidak dapat digapai atau terwujud.

IV. KESIMPULAN

Bahwa dalam kesimpulannya hukum itu sangat memegang peranan penting dalam masyarakat bahkan mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, keuntungan dan tujuan hukum lainnya. Namun keadaan sebaliknya bisa dan sering terjadi, dimana kekuasaan negara menggunakan hukum untuk menekan masyarakat agar dapat mengarahkan masyarakat sesuai keinginan kekuasaan negara. Hukum sebagai alat manipulasi sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat reformasi sosial, dalam pengertian ini hukum berperan dalam mengubah nilai-nilai sosial. Adapun apa yang mendukung atau mendukung teori-teori hukum yang dapat membentuk Masyarakat

Hukum juga berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan manusia seperti kesusilaan, perkawinan, lingkungan, kesehatan dll.

Hukum bergerak lebih lambat dibanding dengan masyarakat yang selalau bergerak dinamis. Dimana hal ini hukum dibuat secara tertulis seperti perundang-undangan yang mana pada proses pembuatan terdapat syarat formal yang perlu dilalui dan rumit. Hukum seharusnya dapat disesuaikan dengan perubahan masyarakat karena hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang kuat. Hubungan perubahan masyarakat dengan hukum adalah hubungan timbal balik yang berarti hukum berpengaruh terhadap perubahan Masyarakat.

Sehingga pemikiran Roscoe Pound lebih menonjol mengenai hukum yang sesuai dengan masyarakat karena dalam aliran ini melihat bagaimana hukum dan masyarakat saling mempengaruhi. Kemudian tujuan aliran ini untuk menemukan hukum yang ideal bagi masyarakat. Sehingga tercapainya cita-cita hukum dalam aliran ini untuk mewujudkan keselarasan dan harmonisasi dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filsafat Hukum* (S. Nurachma (ed.); 1 ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir. (2021). *Hukum : Justifikasi Sosial, Kontrol Sosial Dan Engenering Sosial*. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 03(02), 12–23.
- Kamil, M. I. (2022). *Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)*. *Unizar Law Review (ULR)*, 5(1), 76–83.
- Lathif, N. (2017). *Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*. *Palar | Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Latipulhayat, A. (2014). *Roscoe Pound*. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 413–424. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a12>
- Martinelli, I., Chandra, C. M., & Maharani, A. A. (2023). *Fungsi dan Penerapan Hukum Kontrak Berdasarkan Pandangan Roscoe Pound*. *Journal Kewarganegaraan*, 7(2), 2089–2095.
- McManaman, L. J. (1958). *Social Engineering: The Legal Philosophy of Roscoe Pound*. *St. John's Law Review*, 33(3), 33.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1 ed.). Mataram University Press.
- Orlando, G. (2023). *Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering*. *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Pound, R. (1943). "A Survey of Social Interest." *Harvard Law Review*, 1(57), 1–39.

- Rato, D., Setyawan, F., & Yahya, K. roby. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(1), 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>
- Roscoe, P. (1940). *Contemporary Juristic Theory*. Pomona College, Scripps College, Claremont Colleges.
- Safira, M. (2017). Law Is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesi. *Kodifikasia*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140>
- Sisma, A. F. (2023). Mengenal Sosok Roscoe Pound, Ahli Hukum Asal Amerika Serikat. Katadata. https://katadata.co.id/agung/berita/63d7fe7b2ce97/mengenal-sosok-roscoe-pound-ahli-hukum-asal-amerika-serikat?page=2#google_vignette
- Yahya, Y. M., & Alimuddin, H. (2022). Roscou Pound: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Keterhubungannya Dengan Kaidah La Yunkaru Tagayyur Al- Ahkam Bi Tagayyuri Azzaman) M. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ) Vol.*, 2(8.5.2017), 141–162.